

ABSTRAK

Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kontrak Karya Pertambangan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa perubahan bagi kegiatan pertambangan Indonesia dimana sebelumnya pelaku usaha tambang menggunakan Kontrak Karya untuk melaksanakan usahanya, maka saat ini telah berubah menjadi konsepsi izin berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dalam keberlakuannya, UU No. 4/2009 tetap menghormati Kontrak Karya yang masih berlaku, namun renegotiasi tetap dilaksanakan untuk dapat dimasukkan dalam amandemen kontrak karya.

Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup tentang penelitian dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini adalah renegotiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia sebagai implikasi yuridis kehadiran UU No. 4/2009 dalam posisi pemerintah sejajar dengan PT. Freeport Indonesia didalam Kontrak Karya tersebut, renegotiasi tetap dapat dilakukan meskipun terdapat asas *pacta sunt servanda* sebagai asas yang diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia. Dengan segala upaya pemerintah berusaha untuk mengamandemen kontrak karya PT. Freeport Indonesia, hingga pada awal tahun 2017 pemerintah dapat memastikan bahwa PT. Freeport Indonesia tidak akan meminta perpanjangan Kontrak Karyanya namun bersedia untuk mengganti dengan sistem Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kata Kunci: Kontrak Karya, Renegosiasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus, PT. Freeport Indonesia

ABSTRACT

Juridical implications of Law No. 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining towards Contract of work between PT. Freeport Indonesia with Indonesian Government.

Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining made changes to the Indonesian mining activities where previously mining businessmen using Contract of Work for doing their business then it has now been turned into a permit concept in form of Mining Particular Permit (IUPK). In its enforcement, Law No. 4/2009 still respects the enforceability of the Contract of Work, but renegotiation continued to be conducted to be included in amendment contract work.

This Thesis made by using the normative juridical method through study documents and a review of a norm law written which included research to the specifications research that is descriptive analytical.

The results of this research are renegotiation Contract of Work PT. Freeport Indonesia as the juridical implications of the presence of law No. 4/2009 in the Government position aligned with PT. Freeport Indonesia in the Contract of Work, renegotiation can still do even though there is the principle of pacta sunt servanda as a principle recognized in the law of treaties in Indonesia. With all the efforts the Government is trying to amend the contract of work PT. Freeport Indonesia, early in 2017 the Government can ensure that PT. Freeport Indonesia will not ask for a contract extension of his work but willing to replace the system with Mining Particular Permit (IUPK).

Key Word : Contract of Work, Renegotiation, Mining Particular Permit, PT. Freeport Indonesia